SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

jdih.pontianak.go.id

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

jdih.pontianak.go.id

17. Peraturan Wali Kota Potianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

jdih.pontianak.go.id

12. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis DP2KBP3A Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DP2KBP3A yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB V : PENUTUP.

jdih.pontianak.go.id

(2) Dokumen Rencana Strategis DP2KBP3A Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
(3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

(1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
(2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.pontianak.go.id

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FERRY ABDI, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19770211 200212 1 002

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

https://dppkbpppa.pontianak.go.id/

0561 8103667

dp2kbp3a@pontianak.go.id

Jalan Rahadi Usman Lt 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2030.

Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025– 2030, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Renstra DP2KBP3A berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta masyarakat yang berdaya dan inklusif. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksut dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur 6

2.2. Sumber Daya 12

2.3. Kinerja Pelayanan..... 14

2.4. Kelompok Sasaran Layanan..... 17

2.5. Mitra Perangkat Daerah..... 18

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis PD..... 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 21

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional..... 21

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... 24

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 28

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan PD 28

4.2. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah..... 83

4.3. Indikator Kinerja Utama PD..... 87

4.4. Indikator Kinerja Kunci PD..... 89

BAB V PENUTUP 94

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjadi landasan utama dalam menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah serta menjadi alat kendali dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra ini bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan efektivitas pelayanan publik.

DP2KBP3A Kota Pontianak memiliki mandat dalam menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan yang bersifat wajib non-pelayanan dasar, yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**,** Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketiga urusan ini memiliki nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang inklusif.

Renstra ini disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi aktual dan proyeksi permasalahan di bidang urusan yang ditangani, dengan mengacu pada arah pembangunan nasional melalui RPJMN 2025–2029, prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029, serta agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui Renstra ini, perangkat daerah diharapkan mampu mengarahkan program dan kegiatan secara terukur, berorientasi hasil, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Sebagai dokumen strategis, Renstra DP2KBP3A Tahun 2025–2029 tidak hanya memuat target-target pembangunan, tetapi juga mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan, mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);
17. Peraturan Wali Kota Pontianak 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi acuan dalam perumusan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2025–2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Wali Kota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A;
2. Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan nasional, RPJMD, dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
3. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil;
4. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5. Menyediakan kerangka evaluasi kinerja dan dasar penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PD

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, susunan struktur Organisasi DP2KBP3A Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

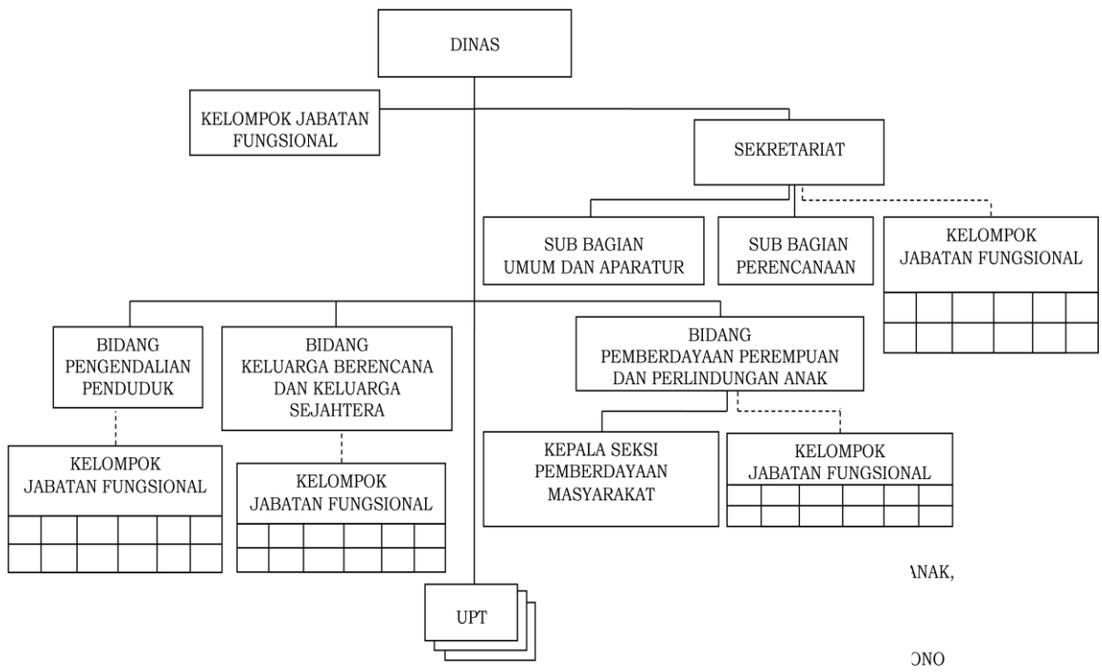

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
    1. Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur; Dan
    2. Kepala Subbagian Perencanaan;
c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;
   1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja DP2KBP3A Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

   Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu merumuskan kebijakan teknis,

penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. perumusan rencana kerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
6. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
2. perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
4. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
5. pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
6. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
7. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;

2. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
5. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan;
2. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan;dan
5. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
2. perumusan program kerja di bidang pengendalian penduduk;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk;
4. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Umum di bidang pengendalian penduduk;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk;
6. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian penduduk;
7. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk;
8. pengelolaan administrasi di bidang pengendalian penduduk; dan
9. pelaksanaan fungsi lain di bidang Pengendalian Penduduk yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
2. perumusan program kerja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
7. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
8. pengelolaan administrasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
9. pelaksanaan fungsi lain di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;

2. perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
5. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
6. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan,
7. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
9. pengelolaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat; dan
10. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
4. pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
6. pelaksanaan tugas lain di di bidang pemberdayaan masyarakat.

i. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan tahun 2025 jumlah pegawai DP2KBP3A Kota Pontianak berjumlah 47 orang yang terdiri dari 39 orang pegawai berstatus ASN dan 8 orang pegawai berstatus non ASN.

Pegawai berpendidikan Strata 1 memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding Pegawai dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebanyak 27 Pegawai yang terdiri dari 27 orang ASN, sedangkan Pegawai dengan tingkat Pendidikan D3 berjumlah 6 orang, semuanya berstatus ASN, Pegawai dengan tingkat Pendidikan Strata 2 berjumlah 4 orang, semuanya berstatus ASN dan pegawai dengan tingkat Pendidikan SMA berjumlah 9 orang, dengan rincian 1 orang berstatus ASN sedangkan 8 orang berstatus non ASN, untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel 2.1 dibawah:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	1	7	1	9
3	D3	1	5	0	0	6
4	S1	3	24	0	0	27
5	S2	2	3	0	0	5
6	S3	0	0	0	0	0
Jumlah		6	33	7	1	47

Sedangkan Pegawai jika dilihat berdasarkan golongan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sampai dengan tahun 2025 didominasi oleh pegawai golongan III yang berjumlah 23 orang, diikuti oleh pegawai golongan IV sebanyak 7 orang, sedangkan pegawai dengan golongan II jumlahnya hanya 2 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	3	3
2	Golongan III	5	25	30
3	Golongan IV	2	4	6
Jumlah		7	32	39

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sampai dengan tahun 2024 sudah cukup terpenuhi. Ada sejumlah aset yang akan dilakukan penghapusan karena rusak dan tidak dapat digunakan. Sedangkan banyaknya aset kendaraan roda 2 sebagian besar digunakan oleh Penyuluh KB. Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang tersedia pada OPD dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Air Conditioning	19		19
2	Komputer PC/PC Unit	42		42
3	Laptop/Notebook	31		31
4	Sepeda Motor	54		54
5	Mobil	3	1	4
6	Printer	40		40
7	Kursi kerja	41		41
8	Kursi rapat/kursi tamu	151		151
9	Meja kerja/meja computer	22		22
10	Meja rapat	15		15
11	Lemari	34		34

2.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan pada tabel II.I dibawah, selama periode Renstra 2020–2024, DP2KBP3A yang menangani urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang bervariasi, baik dari segi keberhasilan, stabilitas, maupun tantangan yang masih perlu diperbaiki.

Dalam pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA), capaian mengalami peningkatan bertahap dari kategori *Pratama* menjadi *Nindya* hingga tahun 2024. Meskipun target akhir menuju *Utama* belum tercapai, progres ini menunjukkan arah yang positif. Namun demikian, perlu upaya lebih kuat dalam integrasi lintas sektor untuk pemenuhan indikator-indikator KLA yang lebih komprehensif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengalami peningkatan dari 93,88 menjadi 94,80, bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan penguatan dalam pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan, meskipun tren kenaikannya masih tergolong landai dan membutuhkan intervensi yang lebih intensif di bidang partisipasi ekonomi dan politik perempuan.

Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menunjukkan hasil yang sesuai harapan, yaitu meningkat dari *Pratama* menjadi *Madya* sejak tahun 2021 dan konsisten hingga 2024. Capaian ini perlu dijaga dan ditingkatkan ke level *Utama* melalui penguatan kelembagaan dan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang lebih terstruktur. Di sisi lain, alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2021–2022, capaian melampaui 300% dari target, namun menurun drastis pada tahun 2023 dan 2024. Ini

mengindikasikan perlunya standardisasi dan konsistensi penganggaran ARG lintas perangkat daerah agar tidak bergantung pada proyek-proyek tertentu saja.

Indikator penanganan anak korban kekerasan menunjukkan capaian yang stabil dan sangat baik, yaitu 100% sepanjang periode 2020–2024. Hal ini menandakan bahwa mekanisme layanan perlindungan anak sudah berjalan efektif dalam hal penjangkauan dan tindak lanjut kasus. Namun, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi kualitas layanan dan pemulihan korban. Sebaliknya, rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) menunjukkan tren yang tidak konsisten. Capaian indikator ini sangat fluktuatif dari tahun ke tahun, mengindikasikan adanya perbedaan dalam pelaporan kasus atau dinamika sosial yang belum teridentifikasi secara sistematis. Hal ini memerlukan penguatan sistem data, validasi laporan, serta kampanye pencegahan yang lebih kuat.

Dalam bidang pengendalian penduduk, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan capaian yang cukup baik dan cenderung menurun dari 1,81 (tahun 2020) menjadi 1,06 (tahun 2024), sesuai dengan arah kebijakan pengendalian jumlah penduduk. Demikian pula Total Fertility Rate (TFR) yang tetap berada di bawah angka 2,1 sepanjang periode, mencerminkan keberhasilan dalam pengaturan kelahiran. Namun, dua indikator utama terkait program Keluarga Berencana yakni *modern contraceptive prevalence rate (mCPR)* dan *unmet need* menunjukkan tantangan tersendiri. Tingkat pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) mengalami penurunan signifikan di tahun 2024, dari 70% menjadi hanya 63,11%, yang dapat mengindikasikan adanya penurunan akses, ketersediaan layanan, atau penurunan partisipasi akseptor. Sementara itu, unmet need KB justru cenderung meningkat, dari 11,93% (2020) menjadi 13,65% (2023), dan sedikit menurun ke 12,49% di tahun 2024, namun belum memenuhi target maksimal yang ditetapkan (7,8%).

Secara umum, capaian indikator pelayanan perangkat daerah menunjukkan keberhasilan dalam beberapa aspek strategis seperti perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan pembangunan gender. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar dalam menjaga konsistensi capaian serta memastikan kualitas layanan yang berkelanjutan. Fluktuasi pada indikator tertentu, seperti ARG, mCPR, dan rasio kekerasan terhadap perempuan, menandakan pentingnya penguatan perencanaan, tata kelola layanan, serta integrasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk lebih jelas dapad dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD pada Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian pada PD pada Tahun 2020-2024					Rasio Capaian PD pada Tahun 2020-2024				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Layak Anak	√			Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	75,00%
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	√			93,88	93,92	93,98	94,05	94,17	93,73	94,01	94,10	94,65	94,80	99,84%	100,10%	100,13%	100,64%	100,67%
3	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	√			Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		√		11,12	11,56	12,17	13,56	13,56	12,8	35,07	39,16	27,58	20,44	115,11%	303,37%	321,77%	203,39%	150,74%
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		√		3,7	3,8	3,6	3,3	7,3	2,09	8,92	7,72	10,00	4,07	143,45	-34,75	-14,50	-103,09	144,21
7	Laju pertumbuhan Penduduk	√			1,71	1,65	1,51	1,23	1,11	1,81	1,02	0,96	0,92	1,06	94,15	138,18	136,42	125,20	104,50
8	TFR (Angka Kelahiran Total)		√		2,17	2,39	2,21	2,19	2,37	2,06	2,06	2,06	2,06	2,01	105,07	113,81	106,79	105,94	115,19
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		√		70,23	70,48	70,52	70,61	70,75	70,4	70,5	69,88	69,68	63,11	100,24	100,03	99,09	98,68	89,20
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		√		12,14	12,47	8	7,7	9,8	11,93	11,13	12,7	13,65	12,49	101,73	110,75	41,25	22,73	72,55

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak mencakup tiga urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (yang dalam konteks Kota Pontianak dilaksanakan pada tingkat kelurahan). Masing-masing urusan memiliki kelompok sasaran yang berbeda sesuai karakteristik layanan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Dalam **urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**, kelompok sasaran utama adalah pasangan usia subur (PUS) dan keluarga pra sejahtera hingga sejahtera I yang menjadi target layanan program KB, konseling keluarga, dan pembinaan ketahanan keluarga. Remaja dan calon pengantin juga menjadi kelompok sasaran penting, khususnya dalam edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan menikah, dan penguatan ketahanan remaja. Selain itu, kader dan petugas lapangan KB (PKB/PLKB) menjadi sasaran strategis dalam peningkatan kapasitas SDM lini lapangan, sedangkan kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan UPPKA diberdayakan sebagai mitra dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

Untuk **urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**, sasaran layanan meliputi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga dan perempuan korban kekerasan, yang mendapatkan layanan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, serta perlindungan dan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial. Anak dan remaja menjadi kelompok prioritas dalam program pemenuhan hak anak, perlindungan khusus, serta pelibatan dalam forum anak dan kegiatan edukatif. Selain itu, SDM layanan seperti P2TP2A, Forum Anak, dan kader PATBM merupakan kelompok sasaran internal yang terus didorong peningkatan kapasitasnya agar layanan perlindungan semakin berkualitas. Masyarakat umum, lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan media juga menjadi bagian dari kelompok sasaran dalam rangka penguatan jejaring pencegahan kekerasan serta pengarusutamaan gender dan hak anak.

Sementara itu, dalam **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** yang dijalankan di wilayah kelurahan, kelompok sasaran difokuskan pada lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan RT/RW sebagai mitra utama dalam membangun partisipasi masyarakat. Kader pemberdayaan masyarakat, kelompok usaha masyarakat, serta forum atau jejaring masyarakat di tingkat kelurahan menjadi sasaran pembinaan dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi warga. Masyarakat rentan seperti keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas juga

menjadi target intervensi untuk memastikan pemerataan akses terhadap program-program pemberdayaan yang inklusif.

Dengan beragamnya kelompok sasaran tersebut, DP2KBP3A Kota Pontianak berkomitmen untuk menyediakan layanan yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran guna mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta masyarakat yang berdaya di tingkat lokal.

2.5. Mitra Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak tidak bekerja secara tunggal, melainkan membangun kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak lintas sektor. Kolaborasi ini menjadi strategi penting dalam memperkuat efektivitas, jangkauan, dan keberlanjutan program-program yang dilaksanakan, khususnya dalam konteks pelayanan yang bersifat integratif dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Mitra kerja DP2KBP3A meliputi unsur perangkat daerah teknis lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah tersebut penting dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, pemenuhan hak anak, layanan perlindungan korban kekerasan, hingga integrasi data kependudukan dan keluarga.

Di luar instansi pemerintah daerah, DP2KBP3A juga bermitra dengan instansi vertikal dan lembaga penegak hukum seperti Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kemenag, dan BKKBN Provinsi. Kerja sama ini terjalin terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan hukum, serta pembinaan ketahanan keluarga dan edukasi pernikahan. Peran lembaga layanan juga sangat krusial, termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Forum Anak dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak dalam layanan berbasis komunitas dan advokasi di tingkat lokal.

Selain itu, DP2KBP3A juga menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi perempuan, dunia usaha, media massa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kolaborasi ini mendukung pelaksanaan program dalam bentuk kampanye publik, sosialisasi, edukasi, pembinaan kelompok masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga.

Keberadaan kader, relawan, dan kelompok masyarakat binaan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta

kelompok UPPKA juga menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan langsung kegiatan di lapangan. Peran mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah menjadi sangat vital untuk menjangkau kelompok sasaran hingga tingkat keluarga dan individu.

Dengan dukungan dari berbagai mitra tersebut, DP2KBP3A dapat memperluas cakupan layanan, mempercepat respons terhadap isu-isu yang berkembang, serta mendorong pendekatan pelayanan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang responsif, DP2KBP3A Kota Pontianak telah melakukan identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, hasil penelusuran data pelayanan, serta penyesuaian terhadap dokumen perencanaan lain seperti Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, KLHS RPJMD, dan dokumen nasional seperti RPJMN 2025–2029. Identifikasi ini juga mempertimbangkan isu lingkungan strategis yang bersifat global, nasional, dan regional, serta potensi dan kewenangan yang dimiliki perangkat daerah.

Permasalahan dirumuskan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang diharapkan, baik dari sisi akses, kualitas, maupun kelembagaan layanan. Selanjutnya, isu strategis disusun sebagai respons terhadap tantangan aktual maupun sebagai upaya untuk memanfaatkan peluang yang relevan dengan kewenangan dan sumber daya daerah.

Teknik penyusunan isu strategis dirangkum melalui Tabel 2.1 di bawah ini, yang mengintegrasikan potensi daerah, permasalahan, isu-isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta isu-isu lingkungan dinamis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel II.II

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	**Permasalahan PD**	**Isu KLHS yang Relevan dengan PD**	**Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD**			**Isu Strategis PD**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
Basis data keluarga by name by address tersedia di Kota Pontianak	Penurunan mCPR dan tingginya *unmet need*	Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi	Urbanisasi dan perubahan pola keluarga	Penurunan partisipasi KB modern (RPJMN)	Kesenjangan wilayah pelayanan KB	Penguatan akses dan keberlanjutan layanan KB berkualitas dan inklusif
Tenaga PKB/PLKB aktif di semua kecamatan	Kualitas layanan penyuluhan dan pendampingan belum merata	Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik	Ketimpangan layanan reproduktif	Transformasi digital layanan KB (Siga, Elsimil)	Beban kerja lapangan belum proporsional	Optimalisasi fungsi lini lapangan dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan KB
Ketersediaan UPTD PPA dan forum anak aktif	Layanan pendampingan korban kekerasan belum merata	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak	Isu global perlindungan HAM perempuan & anak	Isu TPPO dan kekerasan berbasis gender	KDRT dan kasus kekerasan anak di	Penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan berbasis komunitas

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	dan belum optimal				wilayah perkotaan	
Komitmen Pemda terhadap KLA terus meningkat	Status Kota Layak Anak belum mencapai target *Utama*	Pemenuhan hak sipil anak dan partisipasi anak	Tuntutan kota ramah anak secara global	Target peningkatan KLA dalam RPJMN	Keterbatasan fasilitas publik ramah anak	Penguatan sinergi lintas sektor dalam pemenuhan indikator Kota Layak Anak
Keberadaan lembaga kemasyarakatan di semua kelurahan	Keterbatasan kapasitas LPM, PKK, RT/RW dalam pemberdayaan	Penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan	Pemberdayaan komunitas dan ketahanan sosial	Penguatan peran kelembagaan masyarakat (Permendagri 18/2018)	Variasi partisipasi masyarakat antar wilayah	Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan
Ketersediaan kader dan potensi kelompok usaha masyarakat	Partisipasi masyarakat belum optimal dalam perencanaan dan pengawasan	Peningkatan inklusi sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal	Transformasi digital komunitas	Reformasi tata kelola pembangunan kelurahan	Urbanisasi dan ketimpangan sosial	Digitalisasi tata kelola dan kolaborasi pemberdayaan masyarakat berbasis kelurahan

Berdasarkan identifikasi pada tabel di atas, DP2KBP3A Kota Pontianak menghadapi berbagai tantangan yang bersifat teknis, struktural, maupun sosial-budaya dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, terdapat pula potensi kelembagaan, sumber daya manusia, serta komitmen lintas sektor yang dapat dioptimalkan untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut. Keseluruhan isu strategis ini akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan lima tahunan yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 secara lebih terarah dan terpadu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Tahun 2025–2029 mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai kewenangan urusan, serta mengacu pada arah kebijakan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025–2029.

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD

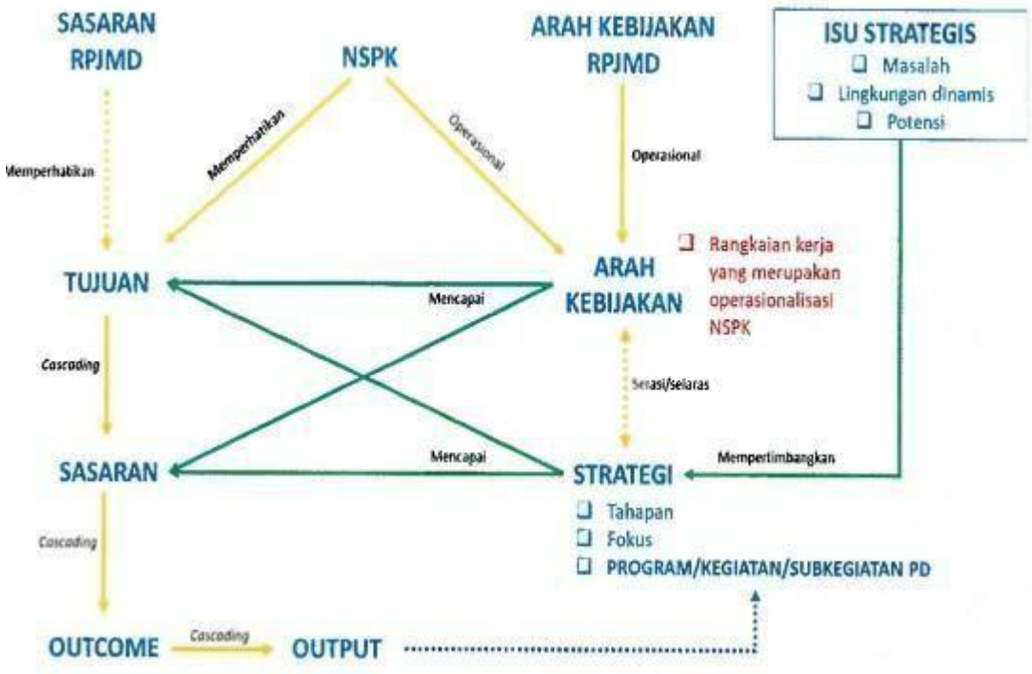

Secara substantif, tujuan dan sasaran Renstra DP2KBP3A berperan penting dalam mendukung **Misi Pertama Wali Kota Pontianak**, yaitu *"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing"*, yang merupakan turunan langsung dari **Visi Wali Kota Pontianak**, yaitu: **"Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis"**.

Peran strategis DP2KBP3A dalam mendukung misi tersebut diwujudkan melalui upaya peningkatan kualitas keluarga, penguatan ketahanan keluarga, pengendalian penduduk yang proporsional, serta pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan masyarakat. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan kontribusi nyata perangkat

daerah terhadap pembangunan manusia dari hulu, yakni melalui penguatan peran keluarga sebagai institusi dasar pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia.

Perumusan tujuan dan sasaran disusun dengan memperhatikan karakteristik outcome jangka menengah, dapat diukur dalam rentang waktu lima tahun, serta menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Tujuan dan sasaran juga diarahkan pada capaian antara (*intermediate outcome*) yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, khususnya Prioritas Nasional 4 dalam RPJMN 2025–2029, yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta Penguatan Ketahanan Keluarga".

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

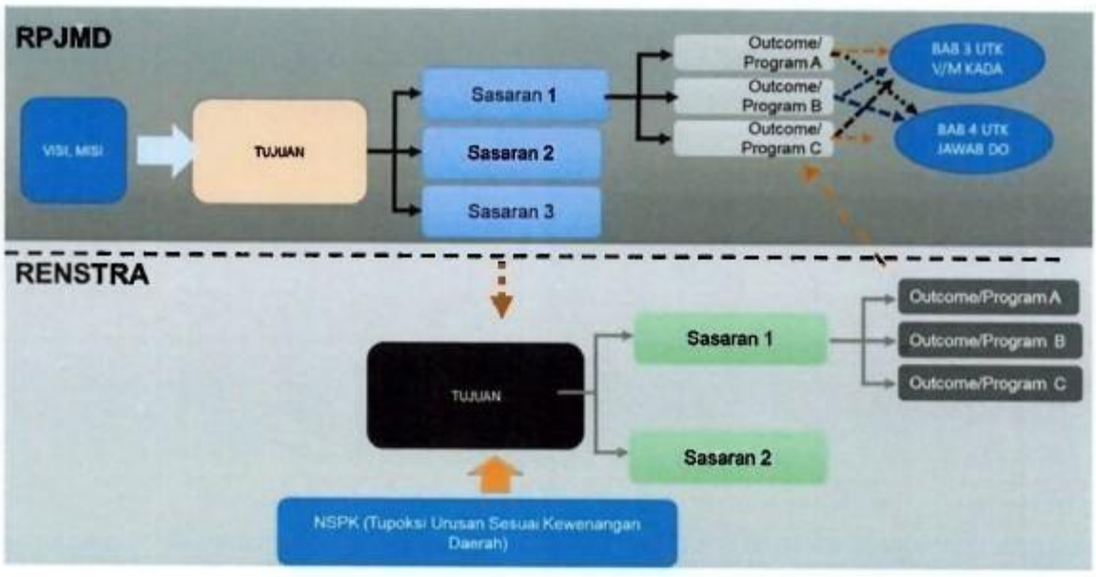

Mempertimbangkan struktur organisasi dan cakupan urusan yang diampu oleh DP2KBP3A yaitu Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka ditetapkan satu tujuan strategis terpadu yang mengintegrasikan ketiga urusan tersebut. Namun, sasaran-sasaran diturunkan secara operasional dan spesifik untuk memastikan kejelasan arah serta akuntabilitas hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, DP2KBP3A Kota Pontianak menetapkan satu **tujuan strategis**, yaitu: **"Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif."**

Tujuan ini tidak hanya relevan dengan urusan yang diampu DP2KBP3A, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia yang unggul, berdaya saing, serta inklusif sebagaimana ditargetkan dalam misi kepala daerah. Upaya mewujudkan keluarga berkualitas, penurunan prevalensi stunting, penguatan ketahanan keluarga, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi kontribusi konkret terhadap misi

pembangunan SDM. Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran PD lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah.

Tabel 3.3
Teknik Perumusan Tujuan dan Sasaran PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif		Prevalensi Stunting pada Balita (SSGI)	22,30	20,20	18,15	16,08	15,08	14,00	13,00	
			Indeks pembangunan keluarga (IPK)	63.15	63.80	64.40	65.00	65.60	66.20	66.80	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.239	0.230	0.220	0.200	0.180	0.160	0.140	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.04	69.00	70.50	72.00	74.00	76.00	78.28	
		Menurunnya angka Keluarga Berisiko Stunting	Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat intervensi	-	30.0	29.0	28.0	26.0	25.0	23.0	
		Menurunnya angka kelahiran total	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.20	2.12	2.11	2.10	2.10	2.10	2.09	
		Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam mendukung upaya perbaikan kesehatan masyarakat dan percepatan penurunan stunting	Persentase peningkatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi aktif	-	13	14	15	16	17	18	
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	-	84.5	85.1	85.8	86.4	87.1	87.8	
		Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.80	95	95.25	95.5	95.75	96	96.25	
			Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	KLA	

Tujuan tersebut pada tabel 3.3 diatas dijabarkan ke dalam lima **sasaran perangkat daerah** yang dilengkapi dengan **indikator kinerja utama** sebagai ukuran pencapaian, yaitu:

1. **Terwujudnya keluarga berkualitas**, diukur dengan tiga indikator: *Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)*, *Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*, dan *Indeks Perlindungan Anak (IPA)*, dengan tren peningkatan bertahap setiap tahun.
2. **Menurunnya angka keluarga berisiko stunting**, dengan indikator *Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapat intervensi*. Target meningkat dari 30% menjadi 60% pada akhir periode.
3. **Menurunnya angka kelahiran total**, dengan indikator *Total Fertility Rate (TFR)* per wanita usia subur (WUS), diturunkan secara bertahap dari 2,20 menjadi 2,10.

4. **Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan**, diukur dengan indikator *persentase peningkatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi aktif*. Target peningkatan lembaga aktif dipatok stabil pada angka 75% sepanjang periode.
5. **Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak**, diukur melalui *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* serta *tingkat capaian Kota Layak Anak (KLA)*, yang ditargetkan meningkat dari kategori Nindya menuju kategori Utama.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kota Pontianak merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai kerangka operasional yang akan dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah.

Strategi merupakan langkah-langkah besar yang bersifat jangka menengah untuk menjawab permasalahan utama dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, arah kebijakan menjelaskan fokus dan ruang lingkup intervensi dalam bentuk pendekatan teknis maupun manajerial yang akan dilakukan untuk mewujudkan strategi secara bertahap dan sistematis.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan dilakukan secara logis dan terintegrasi dengan mempertimbangkan:

1. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan pembangunan daerah.
2. Kesesuaian dengan prioritas nasional, provinsi, dan kota dalam dokumen RPJMD.
3. Ketersediaan sumber daya dan kapasitas pelaksana di tingkat lokal.
4. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi dasar dalam penyusunan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029, serta menjadi rujukan dalam evaluasi capaian kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.

Tabel berikut menyajikan strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan:

Sasaran	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
1. Menurunnya Angka Keluarga Berisiko Stunting	1.1 Penguatan ketahanan keluarga berbasis siklus kehidupan.	a. Pelaksanaan pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara tepat sasaran.
	1.2 Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pendampingan keluarga berisiko stunting.	b. Optimalisasi pemanfaatan SIGA dalam intervensi keluarga berisiko stunting.
		c. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan TPK.
		d. Peningkatan peran serta kader dan masyarakat dalam pencegahan stunting.
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	2.1 Perluasan jangkauan dan kualitas layanan KB modern.	a. Penguatan pelayanan KB di fasilitas kesehatan, jejaring, dan melalui pelayanan mobile.

Sasaran	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
	2.2 Penguatan advokasi dan KIE berbasis budaya lokal dan kelompok sasaran spesifik.	b. Peningkatan akses dan partisipasi kelompok remaja, pasangan usia subur, dan masyarakat rentan terhadap layanan KB dan kesehatan reproduksi.
		c. Peningkatan sinergi lintas sektor dalam pengendalian angka kelahiran.
		d. Pemanfaatan media digital dan kearifan lokal dalam kegiatan KIE.
3. Meningkatkan Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan	3.1 Penguatan kapasitas kelembagaan dan jejaring sosial di tingkat kelurahan.	a. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan seperti Poktan, PPKBD/Sub-PPKBD, BKL, BKR, PIK-R, UPPKA.
	3.2 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis pemberdayaan.	b. Penguatan kemitraan antara lembaga masyarakat dengan pemerintah daerah.
		c. Pengembangan forum partisipatif dan kegiatan gotong royong masyarakat di tingkat kelurahan.
		d. Revitalisasi peran LPM dan RW/RT dalam upaya perbaikan kondisi keluarga dan lingkungan.
4. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	4.1 Pengembangan ekosistem layanan ketahanan keluarga.	a. Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) secara terstandar.
	4.2 Integrasi layanan berbasis siklus kehidupan keluarga.	b. Peningkatan integrasi antar program BKB, BKR, BKL, dan UPPKA.
		c. Pengembangan materi dan media edukasi ketahanan keluarga.
		d. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pemenuhan hak keluarga.
5. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	5.1 Pengarusutamaan gender dan hak anak dalam perencanaan pembangunan daerah.	a. Peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana pembangunan responsif gender dan anak.
	5.2 Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak.	b. Penguatan kelembagaan PUG dan PATBM di tingkat kota dan kelurahan.
		c. Pelayanan penanganan korban kekerasan melalui UPTD PPA.
		d. Advokasi dan edukasi publik untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terencana dan terukur, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kota Pontianak menyusun penahapan pelaksanaan rencana strategis lima tahunan. Penahapan ini disusun berdasarkan urutan logis dari arah kebijakan strategis, tingkat urgensi permasalahan, ketersediaan sumber daya, serta kesinambungan antar program dan kegiatan.

Penahapan pelaksanaan dibagi dalam lima tahun, dari tahun 2025 hingga 2029, dengan mengedepankan pendekatan progresif dan integratif. Pada awal periode, fokus diarahkan pada kegiatan dasar seperti pemetaan, penguatan kelembagaan, dan penyusunan model intervensi. Selanjutnya, tahapan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas, pelaksanaan kegiatan utama, evaluasi, dan pelembagaan praktik baik pada akhir periode Renstra.

Dalam pelaksanaannya, penahapan ini juga mempertimbangkan integrasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta optimalisasi

pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Penahapan pelaksanaan rencana strategis dimuat secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap VI	Tahap V
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Identifikasi dan pemetaan keluarga berisiko stunting	Penguatan integrasi program lintas OPD	Evaluasi dan pemantaua n konvergensi	Penguatan kelembagaa n desa/kelura han dalam intervensi stunting	Konsolidasi dan replikasi model intervensi terintegrasi
Sosialisasi dan penyuluhan KB berbasis budaya lokal	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB	Penguatan kemitraan dan jejaring pelayanan KB	Inovasi layanan KB dan penguatan logistik	Konsolidasi sistem pelayanan KB yang berkelanjutan
Pemilihan dan pemetaan kelembagaan lokal potensial	Pelatihan kader dan fasilitator lokal	Pelaksanaa n aksi kolaboratif kelembagaa n	Replikasi dan penyempur naan model kelembagaa n	Evaluasi dan pelembagaan peran lembaga dalam konvergensi
Revitalisasi kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA	Penguatan kapasitas kelompok dan kader	Pelaksanaa n kegiatan pembinaan keluarga	Evaluasi dan penguatan kelembagaa n keluarga berbasis siklus	Institusionalis asi ketahanan keluarga berbasis masyarakat
Penguatan kelembagaan PUG dan Forum Anak	Pelatihan dan advokasi PUG serta perlindunga n anak	Penguatan sistem pelaporan dan respons cepat kekerasan anak	Integrasi PUG dan perlindunga n anak dalam kebijakan daerah	Monitoring capaian indikator gender dan perlindungan anak

Dalam rangka penyusunan arah kebijakan Renstra DP2KBP3A, acuan utama yang digunakan adalah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. NSPK menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pada setiap urusan, agar selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah. Selanjutnya, NSPK tersebut diturunkan ke dalam arah kebijakan RPJMD Kota Pontianak yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan operasional. Hubungan keterkaitan antara operasionalisasi NSPK, arah kebijakan RPJMD, serta arah kebijakan Renstra DP2KBP3A disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arak Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	NSPK Pengendalian Penduduk dan KB (BKKBN) – mencakup standar pelayanan KB, pendataan keluarga, dan pengendalian fertilitas	Pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan keluarga berkualitas	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, pemutakhiran data keluarga, serta pengendalian penduduk melalui pendekatan keluarga	Selaras dengan NSPK BKKBN

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
2	NSPK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA No. 3 Tahun 2023) – standar layanan perlindungan perempuan dan anak, kelembagaan, serta ARG	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan kelembagaan PPPA, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta implementasi anggaran responsif gender (ARG)	Selaras dengan NSPK PPPA
3	NSPK Pemberdayaan Masyarakat (mengacu UU 23/2014 & pedoman Kemendagri) – penguatan kelembagaan masyarakat dan partisipasi pembangunan	Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan inklusif	Mengacu pada regulasi Kemendagri

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif memerlukan penjabaran yang sistematis dan terukur dari tujuan dan sasaran ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan. Bab ini menguraikan struktur programatik dari Renstra Perangkat Daerah yang disusun secara berjenjang dari hasil *cascading* tujuan, sasaran, outcome, dan output perangkat daerah. Penyusunan ini bertujuan memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan operasional di setiap urusan yang ditangani oleh Perangkat Daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

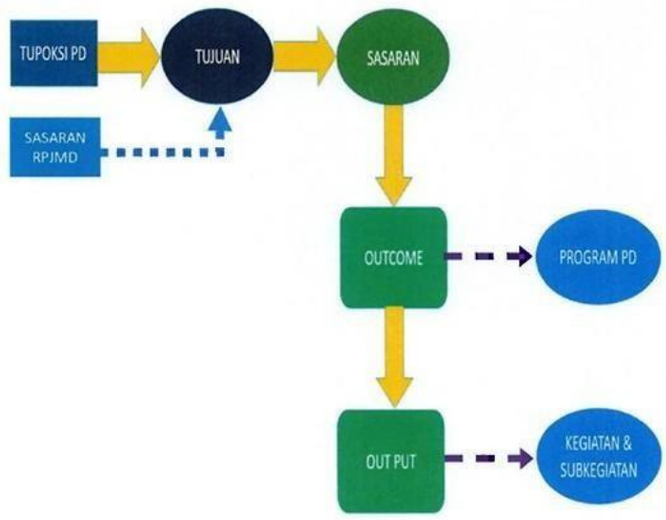

Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.1, kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan dimulai dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah serta sasaran RPJMD, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sasaran tersebut menjadi dasar bagi penetapan outcome dan output, yang kemudian diformulasikan menjadi program, kegiatan, dan subkegiatan.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dimuat dalam dokumen ini mengacu pada nomenklatur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri serta pemutakhiran-pemutakhiran yang berlaku. Penyusunan daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah pada periode 2025–2030, serta menjadi bagian dari proses keberlanjutan perencanaan menuju penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Dengan pendekatan ini, diharapkan terdapat konsistensi antara arah kebijakan nasional, tujuan pembangunan daerah, dan pelaksanaan teknis pada tataran Perangkat Daerah, sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan secara sinergis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025–2030, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan menyusun program dan kegiatan prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome perangkat daerah, dengan indikator kinerja, target tahunan, serta kebutuhan pagu indikatif yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 4.1 berikut menyajikan keterkaitan antara bidang urusan, program, outcome, indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif perangkat daerah selama periode perencanaan 2025–2030.

Melalui perencanaan ini, diharapkan pelaksanaan program perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat di Kota Pontianak. Selain itu, konsistensi target dan pagu indikatif yang disusun menjadi pedoman dalam penganggaran tahunan, sehingga mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4.1 yang disajikan dibawah ini menunjukkan keterkaitan vertikal antara tujuan, sasaran, outcome, output, hingga program/kegiatan/subkegiatan beserta indikatornya. Struktur ini membantu menyusun *logical framework* yang memastikan setiap tahapan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang kuat secara logis dan teknis.

Kolom-kolom dalam tabel 4.1 menyajikan:

1. Tujuan dan sasaran RPJMD : Turunan langsung dari perencanaan strategis RPJMD.
2. Outcome dan output: Hasil dan keluaran dari intervensi program.
3. Indikator**:** Ukuran keberhasilan yang terukur dan dapat diverifikasi.
4. Program/kegiatan/subkegiatan: Nomenklatur resmi yang digunakan PD dalam implementasi kebijakan.

Tabel ini memastikan setiap kegiatan memiliki dasar strategis yang jelas dan logis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program,/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif				Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI) (%)		
					Indeks pembangunan keluarga (IPK) (Indeks)		
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
		Menurunnya angka Keluarga Berisiko Stunting			Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat intervensi (%)		
			Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan		Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		Menurunnya angka kelahiran total			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)		
			Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
			Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
		Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam mendukung upaya perbaikan kesehatan masyarakat dan percepatan penurunan stunting			Persentase peningkatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi aktif (%)		
			Meningkatnya pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Kelurahan		Persentase Kelurahan yang dilakukan Evaluasi terhadap tingkat perkembangannya (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dan Diberdayakan dalam Program Pembangunan (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas			Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)		
			Meningkatkan kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga melalui pernikahan pada usia yang ideal		Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Tahun)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Menurunkan angka kelahiran remaja untuk mendukung keluarga yang lebih terencana dan sejahtera.		Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Penguatan kapasitas dan keberfungsian kelompok ketahanan keluarga sebagai pilar pembinaan keluarga berkualitas di tingkat masyarakat		Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
		Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
					Tingkat Capaian Kota Layak Anak (Level)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatkan updating dan validitas data gender dan anak		Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak (%)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak secara komperhensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.08.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.08.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, diperlukan penjabaran rencana operasional berupa program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilengkapi dengan target indikator kinerja serta alokasi pendanaan secara indikatif setiap tahun selama periode 2026–2030. Penjabaran ini menjadi dasar perencanaan tahunan dan penganggaran secara berkelanjutan, serta menjadi acuan dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tabel berikut menyajikan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator outcome maupun output yang relevan, baseline tahun 2024, target tahunan 2026–2030, dan estimasi pagu anggaran indikatif untuk setiap tahun. Penyusunan rencana ini mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, isu strategis, dan arah kebijakan masing-masing urusan pemerintahan.

Penjabaran program dan kegiatan dalam tabel disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **DP2KBP3A Kota Pontianak**, meliputi:

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB),
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Setiap urusan dijabarkan ke dalam program yang relevan, dilanjutkan dengan kegiatan dan subkegiatan beserta indikator yang terukur serta target yang realistis. Estimasi pagu disusun dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta proyeksi kapasitas fiskal daerah.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan berikut ini.

Tabel 4.2

Rencana Program/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11.065.482.000		16.034.168.863		9.051.631.299		9.298.567.315		9.381.523.438		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.681.672.724		14.973.342.911		7.937.764.051		8.151.284.059		8.199.821.693		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	7.681.672.724	100	14.973.342.911	100	7.937.764.051	100	8.151.284.059	100	8.199.821.693	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125.508.000		118.082.500		123.986.625		127.706.222		131.537.405		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	125.508.000	6	118.082.500	6	123.986.625	6	127.706.222	6	131.537.405		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.858.000		25.000.000		26.250.000		27.037.500		27.848.625		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	36.858.000	2	25.000.000	2	26.250.000	2	27.037.500	2	27.848.625		
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30.750.000		32.287.500		33.901.875		34.918.931		35.966.498		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	30.750.000	1	32.287.500	1	33.901.875	1	34.918.931	1	35.966.498		
2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11.550.000		12.127.500		12.733.875		13.115.891		13.509.367		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.550.000	1	12.127.500	1	12.733.875	1	13.115.891	1	13.509.367		
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.800.000		17.640.000		18.522.000		19.077.660		19.649.989		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	16.800.000	6	17.640.000	6	18.522.000	6	19.077.660	6	19.649.989		
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.550.000		12.127.500		12.733.875		13.115.891		13.509.367		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	11.550.000	5	12.127.500	5	12.733.875	5	13.115.891	5	13.509.367		
2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.516.812		8.772.316		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	3	7.500.000	3	7.875.000	3	8.268.750	3	8.516.812	3	8.772.316		
2.08.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				10.500.000		11.025.000		11.576.250		11.923.537		12.281.243		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		6	10.500.000	6	11.025.000	6	11.576.250	6	11.923.537	6	12.281.243		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.846.209.424		5.986.848.198		5.855.222.673		5.921.919.961		5.785.914.997		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	5.846.209.424	4	5.986.848.198	4	5.855.222.673	4	5.921.919.961	4	5.785.914.997		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34		34		34		34		34			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.608.619.424		5.737.378.698		5.593.279.698		5.652.118.698		5.508.019.698		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34	5.608.619.424	34	5.737.378.698	34	5.593.279.698	34	5.652.118.698	34	5.508.019.698		
2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				193.490.000		203.164.500		213.322.725		219.722.406		226.314.078		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	193.490.000	12	203.164.500	12	213.322.725	12	219.722.406	12	226.314.078		
2.08.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				21.000.000		22.050.000		23.152.500		23.847.075		24.562.487		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	4	21.000.000	4	22.050.000	4	23.152.500	4	23.847.075	4	24.562.487		
2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11.550.000		12.127.500		12.733.875		13.115.891		13.509.367		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	11.550.000	5	12.127.500	5	12.733.875	5	13.115.891	5	13.509.367		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.550.000		12.127.500		12.733.875		13.115.891		13.509.367		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	48	48	11.550.000	48	12.127.500	48	12.733.875	48	13.115.891	48	13.509.367		
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.516.812		8.772.316		
Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.516.812		8.772.316		
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.516.812		8.772.316		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.516.812		8.772.316		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120.830.000		203.330.648		213.497.180		219.902.094		226.499.155		
Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	120.830.000	4	203.330.648	4	213.497.180	4	219.902.094	4	226.499.155		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	34	34		34		34		34		34			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				56.580.000		135.868.148		142.661.555		146.941.401		151.349.643		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	56.580.000	4	135.868.148	4	142.661.555	4	146.941.401	4	151.349.643		
2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.500.000		5.775.000		6.063.750		6.245.662		6.433.031		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	5.500.000	4	5.775.000	4	6.063.750	4	6.245.662	4	6.433.031		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.000.000		45.150.000		47.407.500		48.829.725		50.294.616		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	34	34	43.000.000	34	45.150.000	34	47.407.500	34	48.829.725	34	50.294.616		
2.08.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.750.000		16.537.500		17.364.375		17.885.306		18.421.865		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60	60	15.750.000	60	16.537.500	60	17.364.375	60	17.885.306	60	18.421.865		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				362.556.300		380.684.115		399.718.318		411.709.864		424.061.157		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	362.556.300	4	380.684.115	4	399.718.318	4	411.709.864	4	424.061.157		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.081.000		5.335.050		5.601.802		5.769.856		5.942.951		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.081.000	1	5.335.050	1	5.601.802	1	5.769.856	1	5.942.951		
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.119.300		56.825.265		59.666.528		61.456.523		63.300.218		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	54.119.300	4	56.825.265	4	59.666.528	4	61.456.523	4	63.300.218		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.605.000		11.135.250		11.692.012		12.042.772		12.404.055		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	10.605.000	4	11.135.250	4	11.692.012	4	12.042.772	4	12.404.055		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.954.000		30.401.700		31.921.785		32.879.438		33.865.821		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	28.954.000	4	30.401.700	4	31.921.785	4	32.879.438	4	33.865.821		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.975.000		32.523.750		34.149.937		35.174.435		36.229.668		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	30.975.000	4	32.523.750	4	34.149.937	4	35.174.435	4	36.229.668		
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.985.000		6.284.250		6.598.462		6.796.415		7.000.307		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36	5.985.000	36	6.284.250	36	6.598.462	36	6.796.415	36	7.000.307		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				219.337.000		230.303.850		241.819.042		249.073.613		256.545.821		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15	219.337.000	15	230.303.850	15	241.819.042	15	249.073.613	15	256.545.821		
2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.500.000		7.875.000		8.268.750		8.516.812		8.772.316		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	7.500.000	2	7.875.000	2	8.268.750	2	8.516.812	2	8.772.316		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				193.003.700		202.653.885		212.786.579		219.170.176		225.745.281		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	193.003.700	5	202.653.885	5	212.786.579	5	219.170.176	5	225.745.281		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6		6		6		6		6			
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				52.000.000		54.600.000		57.330.000		59.049.900		60.821.397		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6	52.000.000	6	54.600.000	6	57.330.000	6	59.049.900	6	60.821.397		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				141.003.700		148.053.885		155.456.579		160.120.276		164.923.884		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	141.003.700	5	148.053.885	5	155.456.579	5	160.120.276	5	164.923.884		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				666.311.300		699.626.865		734.608.208		840.992.942		983.884.416		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	666.311.300	4	699.626.865	4	734.608.208	4	840.992.942		983.884.416		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.300.000		6.615.000		6.945.750		7.154.122		7.368.745		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	6.300.000	4	6.615.000	4	6.945.750	4	7.154.122		7.368.745		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.243.620		128.355.801		134.773.591		138.816.798		142.981.301		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	122.243.620	12	128.355.801	12	134.773.591	12	138.816.798	12	142.981.301		
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		68.250.000		71.662.500		158.158.864		280.565.318		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	65.000.000	2	68.250.000	2	71.662.500	2	158.158.864	2	280.565.318		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				472.767.680		496.406.064		521.226.367		536.863.158		552.969.052		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	472.767.680	12	496.406.064	12	521.226.367	12	536.863.158	12	552.969.052		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				359.754.000		7.374.241.700		389.675.718		401.365.988		413.406.966		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	45	359.754.000	45	7.374.241.700	45	389.675.718	45	401.365.988	45	413.406.966		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	51		51		51		51		51			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7		8		7		8		8			
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				227.184.000		238.543.200		250.692.293		258.213.061		265.959.452		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	51	227.184.000	51	238.543.200	51	250.692.293	51	258.213.061	51	265.959.452		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.570.000		65.698.500		68.983.425		71.052.927		73.184.514		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	45	62.570.000	45	65.698.500	45	68.983.425	45	71.052.927	45	73.184.514		
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		7.070.000.000		70.000.000		72.100.000		74.263.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	7	70.000.000	8	7.070.000.000	7	70.000.000	8	72.100.000	8	74.263.000		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				140.750.000		185.590.000		194.869.499		200.715.582		206.737.048		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	20,44	29,08	140.750.000	30,58	185.590.000	31,08	194.869.499	32,58	200.715.582	33,08	206.737.048	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				68.400.000		70.452.000		73.974.599		76.193.836		78.479.650		
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	68.400.000	2	70.452.000	2	73.974.599	2	76.193.836	2	78.479.650		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2	2											
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				27.143.000		27.957.290		29.355.154		30.235.808		31.142.882		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	27.143.000	2	27.957.290	2	29.355.154	2	30.235.808	2	31.142.882		
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				13.915.000		14.332.450		15.049.072		15.500.544		15.965.560		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2	2	13.915.000		14.332.450		15.049.072		15.500.544		15.965.560		
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				27.342.000		28.162.260		29.570.373		30.457.484		31.371.208		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	30	30	27.342.000	30	28.162.260	30	29.570.373	30	30.457.484	30	31.371.208		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				72.350.000		115.138.000		120.894.900		124.521.746		128.257.398		
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	50	50	72.350.000	50	115.138.000	50	120.894.900	50	124.521.746	50	128.257.398		
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	50	50		50		50		50		50			
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				61.500.000		103.962.500		109.160.625		112.435.443		115.808.506		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	50	50	61.500.000	50	103.962.500	50	109.160.625	50	112.435.443	50	115.808.506		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.850.000		11.175.500		11.734.275		12.086.303		12.448.892		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	50	50	10.850.000	50	11.175.500	50	11.734.275	50	12.086.303	50	12.448.892		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				49.559.800		53.524.584		56.200.813		57.886.834		59.623.436		
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio)	4,07	7,1	49.559.800	7	53.524.584	6,9	56.200.813	6,8	57.886.834	6,7	59.623.436	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				11.260.000		11.823.000		12.414.150		12.786.574		13.170.171		
Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	25	25	11.260.000	25	11.823.000	25	12.414.150	25	12.786.574	25	13.170.171		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				11.260.000		11.823.000		12.414.150		12.786.574		13.170.171		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	25	25	11.260.000	25	11.823.000	25	12.414.150	25	12.786.574	25	13.170.171		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan				13.040.000		13.496.400		14.171.220		14.596.356		15.034.246		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	57	40	13.040.000	40	13.496.400	40	14.171.220	40	14.596.356	40	15.034.246		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				13.040.000		13.496.400		14.171.220		14.596.356		15.034.246		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	57	40	13.040.000	40	13.496.400	40	14.171.220	40	14.596.356	40	15.034.246		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.259.800		28.205.184		29.615.443		30.503.904		31.419.019		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	20	20	25.259.800	20	28.205.184	20	29.615.443	20	30.503.904	20	31.419.019		
	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	25	25		25		25		25		25			
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10.939.800		13.383.984		14.053.183		14.474.778		14.909.021		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	20	20	10.939.800	20	13.383.984	20	14.053.183	20	14.474.778	20	14.909.021		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				7.160.000		7.410.600		7.781.130		8.014.563		8.254.999		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	25	25	7.160.000	25	7.410.600	25	7.781.130	25	8.014.563	25	8.254.999		
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				7.160.000		7.410.600		7.781.130		8.014.563		8.254.999		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	25	25	7.160.000	25	7.410.600	25	7.781.130	25	8.014.563	25	8.254.999		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				11.130.000		12.020.400		12.621.420		13.000.062		13.390.063		
Meningkatkan updating dan validitas data gender dan anak	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak (%)	100	100	11.130.000	100	12.020.400	100	12.621.420	100	13.000.062	100	13.390.063	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				11.130.000		12.020.400		12.621.420		13.000.062		13.390.063		
Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2	2	11.130.000	2	12.020.400	2	12.621.420	2	13.000.062	2	13.390.063		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				11.130.000		12.020.400		12.621.420		13.000.062		13.390.063		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2	2	11.130.000	2	12.020.400	2	12.621.420	2	13.000.062	2	13.390.063		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				2.594.889.976		216.757.108		227.594.963		234.422.810		241.455.493		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak secara komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	64,47	2.594.889.976	66,17	216.757.108	67,87	227.594.963	69,57	234.422.810	71,27	241.455.493	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				143.744.000		143.744.000		150.931.200		155.459.135		160.122.909		
Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	30	30	143.744.000	30	143.744.000	30	150.931.200	30	155.459.135	30	160.122.909		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	20		20		20		20		20			
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				128.744.400		128.744.400		135.181.620		139.237.068		143.414.180		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	20	128.744.400	20	128.744.400	20	135.181.620	20	139.237.068	20	143.414.180		
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				14.999.600		14.999.600		15.749.580		16.222.067		16.708.729		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	30	30	14.999.600	30	14.999.600	30	15.749.580	30	16.222.067	30	16.708.729		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2.451.145.976		73.013.108		76.663.763		78.963.675		81.332.584		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	20	20	2.451.145.976	20	73.013.108	20	76.663.763	20	78.963.675	20	81.332.584		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	25	25		25		25		25		25			
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				22.866.000		22.866.000		24.009.300		24.729.579		25.471.466		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	20	20	22.866.000	20	22.866.000	20	24.009.300	20	24.729.579	20	25.471.466		
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2.417.453.476		39.320.608		41.286.638		42.525.237		43.800.994		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	2.417.453.476	4	39.320.608	4	41.286.638	4	42.525.237	4	43.800.994		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10.826.500		10.826.500		11.367.825		11.708.859		12.060.124		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	25	25	10.826.500	25	10.826.500	25	11.367.825	25	11.708.859	25	12.060.124		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				587.479.500		592.933.860		622.580.553		641.257.968		660.495.705		
Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	87,72	587.479.500	88,56	592.933.860	89,4	622.580.553	90,24	641.257.968	91,08	660.495.705	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				536.174.000		541.628.360		568.709.778		585.771.071		603.344.202		
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	4	4	536.174.000	4	541.628.360	4	568.709.778	4	585.771.071	4	603.344.202		
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.500.000		10.815.000		11.139.450		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.500.000	2	10.815.000	2	11.139.450		
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				519.300.000		519.300.000		545.265.000		561.622.950		578.471.638		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	4	4	519.300.000	4	519.300.000	4	545.265.000	4	561.622.950	4	578.471.638		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				6.874.000		12.328.360		12.944.778		13.333.121		13.733.114		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	25	25	6.874.000	25	12.328.360	25	12.944.778	25	13.333.121	25	13.733.114		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.479.000		40.479.000		42.502.950		43.778.038		45.091.379		
Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	57	40	40.479.000	40	40.479.000	40	42.502.950	40	43.778.038	40	45.091.379		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	57	40		40		40		40		40			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				20.279.000		20.279.000		21.797.950		20.678.038		21.391.379		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	57	40	20.279.000	40	20.279.000	40	21.797.950	40	20.678.038	40	21.391.379		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				20.200.000		20.200.000		20.705.000		23.100.000		23.700.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	57	40	20.200.000	40	20.200.000	40	20.705.000	40	23.100.000	40	23.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.826.500		10.826.500		11.367.825		11.708.859		12.060.124		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	2	10.826.500	2	10.826.500	2	11.367.825	2	11.708.859	2	12.060.124		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				10.826.500		10.826.500		11.367.825		11.708.859		12.060.124		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	2	10.826.500	2	10.826.500	2	11.367.825	2	11.708.859	2	12.060.124		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.252.470.000		2.270.103.952		2.359.199.149		2.455.395.313		2.529.057.169		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				314.071.100		314.071.100		329.774.655		339.667.894		349.857.930		
Meningkatnya pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang dilakukan Evaluasi terhadap tingkat perkembangannya (%)	100	100	314.071.100	100	314.071.100	100	329.774.655	100	339.667.894	100	349.857.930	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				314.071.100		314.071.100		329.774.655		339.667.894		349.857.930		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	3	3	314.071.100	3	314.071.100	3	329.774.655	3	339.667.894	3	349.857.930		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				314.071.100		314.071.100		329.774.655		339.667.894		349.857.930		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	3	3	314.071.100	3	314.071.100	3	329.774.655	3	339.667.894	3	349.857.930		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.938.398.900		1.956.032.852		2.029.424.494		2.115.727.419		2.179.199.239		
Meningkatnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dan Diberdayakan dalam Program Pembangunan (%)	-	50	1.938.398.900	55	1.956.032.852	60	2.029.424.494	65	2.115.727.419	70	2.179.199.239	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.938.398.900		1.956.032.852		2.029.424.494		2.115.727.419		2.179.199.239		
Terlaksananya Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	36	36	1.938.398.900	36	1.956.032.852	36	2.029.424.494	36	2.115.727.419	36	2.179.199.239		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	36	36		36		36		36		36			
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				123.166.500		161.666.500		169.749.825		174.842.319		180.087.588		
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	123.166.500	1	161.666.500	1	169.749.825	1	174.842.319	1	180.087.588		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				72.084.900		51.218.852		53.779.794		55.393.187		57.054.982		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	36	36	72.084.900	36	51.218.852	36	53.779.794	36	55.393.187	36	57.054.982		
2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga				11.940.000		11.940.000		12.537.000		12.913.110		13.300.503		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	36	36	11.940.000	36	11.940.000	36	12.537.000	36	12.913.110	36	13.300.503		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				13.233.000		13.233.000		13.894.650		14.589.382		15.027.063		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	2	13.233.000	2	13.233.000	2	13.894.650	2	14.589.382	2	15.027.063		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				497.474.500		497.474.500		522.348.225		538.018.671		554.159.231		
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	497.474.500	1	497.474.500	1	522.348.225	1	538.018.671	1	554.159.231		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.220.500.000		1.220.500.000		1.257.115.000		1.319.970.750		1.359.569.872		
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	4	1.220.500.000	4	1.220.500.000	4	1.257.115.000	4	1.319.970.750	4	1.359.569.872		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.300.137.900		3.321.563.908		3.355.041.627		3.376.192.875		3.403.828.657		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				339.500.000		345.060.000		352.063.000		356.774.890		367.478.135		
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) (%)	80,44	84,14	75.000.000	85,79	75.000.000	87,44	78.250.000	89,09	80.597.500	90,74	83.015.425	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				75.000.000		75.000.000		78.250.000		80.597.500		83.015.425		
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	4	4	75.000.000	4	75.000.000	4	78.250.000	4	80.597.500	4	83.015.425		
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				50.000.000		50.000.000		52.500.000		54.075.000		55.697.250		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	52.500.000	4	54.075.000	4	55.697.250		
2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				25.000.000		25.000.000		25.750.000		26.522.500		27.318.175		
Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.750.000	4	26.522.500	4	27.318.175		
Meningkatkan kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga melalui pernikahan pada usia yang ideal	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Tahun)	22,7	22,5	264.500.000	22,6	270.060.000	22,7	273.813.000	22,8	276.177.390	22,9	284.462.710		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				264.500.000		270.060.000		273.813.000		276.177.390		284.462.710		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	264.500.000	1	270.060.000	1	273.813.000	1	276.177.390	1	284.462.710		
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	3	3		3		3		3		3			
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		61.800.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	61.800.000		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				20.000.000		20.600.000		21.630.000		22.278.900		22.947.267		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.600.000	1	21.630.000	1	22.278.900	1	22.947.267		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		64.890.000		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	4	4	63.000.000	4	63.000.000	4	63.000.000	4	63.000.000	4	64.890.000		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				72.000.000		72.000.000		72.000.000		72.000.000		74.160.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	4	4	72.000.000	4	72.000.000	4	72.000.000	4	72.000.000	4	74.160.000		
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				14.900.000		18.822.000		19.763.100		20.355.993		20.966.672		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2	2	14.900.000	2	18.822.000	2	19.763.100	2	20.355.993	3	20.966.672		
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				24.600.000		25.338.000		26.604.900		27.403.047		28.225.138		
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	3	3	24.600.000	3	25.338.000	3	26.604.900	3	27.403.047	3	28.225.138		
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				10.000.000		10.300.000		10.815.000		11.139.450		11.473.633		
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.300.000	1	10.815.000	1	11.139.450	1	11.473.633		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.862.593.100		1.865.552.548		1.867.949.700		1.869.220.191		1.870.528.796		
Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	63,11	62,38	1.819.393.100	63,93	1.822.352.548	65,48	1.824.749.700	67,03	1.826.020.191	68,58	1.827.328.796	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan				806.617.000		806.617.000		806.617.000		806.617.000		806.617.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	16	16	806.617.000	16	806.617.000	16	806.617.000	16	806.617.000	16	806.617.000		
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				258.000.000		258.000.000		258.000.000		258.000.000		258.000.000		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	4	4	258.000.000	4	258.000.000	4	258.000.000	4	258.000.000	4	258.000.000		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				114.000.000		114.000.000		114.000.000		114.000.000		114.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	4	4	114.000.000	4	114.000.000	4	114.000.000	4	114.000.000	4	114.000.000		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				97.267.000		97.267.000		97.267.000		97.267.000		97.267.000		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3	3	97.267.000	3	97.267.000	3	97.267.000	3	97.267.000	3	97.267.000		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				337.350.000		337.350.000		337.350.000		337.350.000		337.350.000		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	16	16	337.350.000	16	337.350.000	16	337.350.000	16	337.350.000	16	337.350.000		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				275.500.000		275.500.000		275.500.000		275.500.000		275.500.000		
Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	580	580	275.500.000	580	275.500.000	580	275.500.000	580	275.500.000	580	275.500.000		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				275.500.000		275.500.000		275.500.000		275.500.000		275.500.000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	580	580	275.500.000	580	275.500.000	580	275.500.000	580	275.500.000	580	275.500.000		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				737.276.100		740.235.548		742.632.700		743.903.191		745.211.796		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	90	90	737.276.100	90	740.235.548	90	742.632.700	90	743.903.191	90	745.211.796		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1.535	1.535		1.535		1.535		1.535		1.535			
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				686.783.000		686.783.000		686.783.000		686.783.000		686.783.000		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1.535	1.535	686.783.000	1.535	686.783.000	1.535	686.783.000	1.535	686.783.000	1.535	686.783.000		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2	2	13.500.000	2	13.500.000	2	13.500.000	2	13.500.000	2	13.500.000		
2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				36.993.100		39.952.548		42.349.700		43.620.191		44.928.796		
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	90	90	36.993.100	90	39.952.548	90	42.349.700	90	43.620.191	90	44.928.796		
Menurunkan angka kelahiran remaja untuk mendukung keluarga yang lebih terencana dan sejahtera.	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	15	19	43.200.000	18,6	43.200.000	18,2	43.200.000	17,8	43.200.000	17,4	43.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				43.200.000		43.200.000		43.200.000		43.200.000		43.200.000		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	29	29	43.200.000	29	43.200.000	29	43.200.000	29	43.200.000	29	43.200.000		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				43.200.000		43.200.000		43.200.000		43.200.000		43.200.000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	29	29	43.200.000	29	43.200.000	29	43.200.000	29	43.200.000	29	43.200.000		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.098.044.800		1.110.951.360		1.135.028.927		1.150.197.794		1.165.821.726		
Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan (%)	66	91	600.600.000	92	600.600.000	93	600.600.000	94	600.600.000	95	600.600.000	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				600.600.000		600.600.000		600.600.000		600.600.000		600.600.000		
Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	10	10	600.600.000	10	600.600.000	10	600.600.000	10	600.600.000	10	600.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	10	10		10		10		10		10			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				273.000.000		273.000.000		273.000.000		273.000.000		273.000.000		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	10	10	273.000.000	10	273.000.000	10	273.000.000	10	273.000.000	10	273.000.000		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				327.600.000		327.600.000		327.600.000		327.600.000		327.600.000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	10	10	327.600.000	10	327.600.000	10	327.600.000	10	327.600.000	10	327.600.000		
Penguatan kapasitas dan keberfungsian kelompok ketahanan keluarga sebagai pilar pembinaan keluarga berkualitas di tingkat masyarakat	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif (%)	100	100	497.444.800	100	510.351.360	100	534.428.927	100	549.597.794	100	565.221.726		
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				497.444.800		510.351.360		534.428.927		549.597.794		565.221.726		
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	8	8	497.444.800	8	510.351.360	8	534.428.927	8	549.597.794	8	565.221.726		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2	2											
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	50	50		50		50		50		50			
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	6	6	28.800.000	6	28.800.000	6	28.800.000	6	28.800.000	6	28.800.000		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				307.312.800		315.379.400		331.148.370		341.082.821		351.315.305		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2	2	307.312.800		315.379.400		331.148.370		341.082.821		351.315.305		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				133.426.400		137.429.192		144.300.651		148.629.670		153.088.560		
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	50	50	133.426.400	50	137.429.192	50	144.300.651	50	148.629.670	50	153.088.560		
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				17.905.600		18.442.768		19.364.906		19.945.853		20.544.228		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2	2	17.905.600	2	18.442.768	2	19.364.906	2	19.945.853	2	20.544.228		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				10.000.000		10.300.000		10.815.000		11.139.450		11.473.633		
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	8	8	10.000.000	8	10.300.000	8	10.815.000	8	11.139.450	8	11.473.633		

4.2. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan keterkaitan antara program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah, penyusunan daftar subkegiatan prioritas menjadi instrumen penting untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Setiap subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah harus dapat menunjang pencapaian outcome dari program prioritas yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Tabel ini memuat informasi tentang daftar subkegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak beserta outcome yang ingin dicapai, sehingga dapat diidentifikasi kontribusinya terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Melalui penyusunan tabel ini, diharapkan terdapat keselarasan antara pelaksanaan subkegiatan dengan dokumen perencanaan, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Dengan demikian, **Tabel 4.3** menjadi dokumen penting yang menggambarkan kesinambungan antara kebijakan perencanaan strategis dan operasional, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan oleh perangkat daerah.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
			2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatkan updating dan validitas data gender dan anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
4.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak secara komperhensif	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
5.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
6.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Kelurahan	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
7.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
8.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
			2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
		Meningkatkan kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga melalui pernikahan pada usia yang ideal	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
			2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
			2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
9.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
		Menurunkan angka kelahiran remaja untuk mendukung keluarga yang lebih terencana dan sejahtera.	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
10.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penguatan kapasitas dan keberfungsian kelompok ketahanan keluarga sebagai pilar pembinaan keluarga berkualitas di tingkat masyarakat	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
		Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

4.3. Indikator Kinerja Utama PD

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Kota Pontianak, telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang paling representatif dan strategis untuk menunjukkan capaian utama dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode perencanaan 2025–2030.

Penetapan IKU dilakukan secara selektif, mempertimbangkan relevansi indikator terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, kemudahan pengukuran, ketersediaan data, dan kesinambungan dengan tujuan pembangunan nasional maupun daerah. IKU yang ditetapkan dalam dokumen ini bersifat lintas program dan menjadi acuan utama dalam evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan menggunakan IKU, diharapkan proses pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah dapat lebih fokus, terarah, dan obyektif.

Adapun IKU yang ditetapkan untuk setiap sasaran strategis DP2KBP3A akan ditampilkan pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.	Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI)	%	22,3	21	19,6	18,2	16,8	15,4	14	
3.	Indeks pembangunan keluarga (IPK)	Indeks	63,15	63,8	64,4	65	65,6	66,2	66,8	
4.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,239	0,23	0,22	0,2	0,18	0,16	0,14	
5.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,04	69	70,5	72	74	76	78,28	
6.	Persentase peningkatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi aktif	%	-	13	14	15	16	17	18	
7.	Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat intervensi	%	-	30	29	28	26	25	23	
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,8	95	95,25	95,5	95,75	96	96,25	
9.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,2	2,12	2,11	2,1	2,1	2,1	2,09	
10.	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	-	84,5	85,1	85,8	86,4	87,1	87,8	
11.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Level	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	KLA	

Tabel tersebut memuat nama indikator, satuan, target capaian tahunan sejak 2025 hingga 2030, serta baseline dan tren kinerja yang menjadi dasar penetapan target. IKU yang dipilih juga telah mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan keluarga berkualitas, pengendalian penduduk yang efektif, serta kesetaraan gender dan perlindungan anak yang lebih baik di Kota Pontianak.

Beberapa indikator utama yang ditetapkan antara lain:

1. **Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI)**
   Menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 22,3% pada tahun 2024 menjadi target 13% pada tahun 2030. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung target nasional pengurangan stunting.
2. **Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)**
   Mengalami peningkatan dari 63,15 pada 2024 menjadi 66,8 pada tahun 2030. Indeks ini mengukur keberfungsian keluarga berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan.
3. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** dan **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**
   Keduanya memperlihatkan tren membaik. IKG ditargetkan menurun dari 0,239 ke 0,14 (semakin rendah lebih baik), sementara IPG meningkat dari 94,8 menjadi 96,25 (semakin tinggi menunjukkan kesetaraan yang lebih baik).
4. **Indeks Perlindungan Anak (IPA)**
   Meningkat secara bertahap dari 66,04 ke 78,28 pada tahun 2030, menunjukkan penguatan kebijakan dan layanan perlindungan anak.
5. **Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)**

   Targetnya adalah meningkat dari level *Nindya* menjadi *Utama* pada 2028 dan akhirnya mencapai *KLA* penuh di tahun 2030.
6. **Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi** dan **angka fertilitas total (TFR)**
   Menunjukkan komitmen daerah dalam pelayanan KB yang efektif dan pengendalian angka kelahiran, dengan TFR ditargetkan turun dari 2,2 menjadi 2,09.
7. **Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan** serta **jumlah lembaga kemasyarakatan aktif**
   Ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dan penguatan peran kelembagaan dalam pembangunan keluarga dan pencegahan stunting.

Penetapan IKU dilakukan secara selektif, mempertimbangkan relevansi indikator terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, kemudahan pengukuran, ketersediaan data, dan kesinambungan dengan tujuan pembangunan nasional maupun daerah. IKU yang ditetapkan dalam dokumen ini bersifat lintas program dan menjadi acuan utama dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.4. Indikator Kinerja Kunci PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks Renstra Pemerintah Kota Pontianak, IKU ditentukan berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan outcome dari masing-masing urusan pemerintahan, serta perannya dalam mengarahkan fokus kinerja perangkat daerah. Penentuan IKU juga mempertimbangkan karakteristik indikator, seperti *positif* (semakin tinggi nilai, semakin baik) atau *negatif* (semakin rendah nilai, semakin baik), serta tren capaian yang diharapkan selama periode perencanaan.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	positif	%	20,44	28,58	29,08	30,58	31,08	32,58	33,08	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Rasio	4,07	7,2	7,1	7	6,9	6,8	6,7	
4.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
5.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun)	negatif	Rata-rata Anak per Wanita	2,2	2,12	2,11	2,1	2,1	2,1	2,09	

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat dua indikator kunci. Pertama, *rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* per 100.000 penduduk perempuan. Indikator ini bersifat negatif, artinya semakin rendah angka kekerasan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Baseline tahun 2024 sebesar 4,07 ditargetkan meningkat menjadi 7,20 pada tahun 2025 untuk mencerminkan peningkatan pelaporan, dan secara bertahap menurun hingga 6,70 pada akhir periode Renstra tahun 2030, sejalan dengan penguatan sistem perlindungan dan pencegahan. Kedua, *persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)* dalam belanja langsung APBD, yang bersifat positif dan menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap isu kesetaraan gender. Baseline tahun 2024 sebesar 20,44% ditargetkan meningkat secara progresif hingga mencapai 33,08% pada tahun 2030.

Sementara itu, untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), indikator kunci yang digunakan mencerminkan aspek kuantitas penduduk, kualitas keluarga, serta perubahan perilaku masyarakat terhadap isu kependudukan. Pertama, *angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)* per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15–49 tahun, yang bersifat negatif. TFR sebesar 2,20 pada tahun 2024 ditargetkan menurun menjadi 2,09 pada tahun 2030, mencerminkan keberhasilan program KB dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Dengan demikian, indikator-indikator ini menjadi representasi keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berperspektif gender, dan berbasis keluarga. Pencapaiannya menjadi acuan utama dalam penyusunan program, kegiatan, dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah secara terukur.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Pontianak Tahun 2025–2030 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Pemberdayaan Masyarakat. Dokumen ini berisi arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang terintegrasi dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, termasuk RPJMD dan RPJPD.

Secara substantif, dokumen Renstra ini menekankan pentingnya pencapaian keluarga berkualitas sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia yang unggul, kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai pilar pembangunan inklusif, serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif kelembagaan sosial di tingkat lokal. Seluruh kebijakan dan sasaran diturunkan dalam bentuk indikator kinerja kunci yang terukur, terpantau, dan memiliki arah pencapaian yang selaras dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar pelaksanaan Renstra ini berjalan efektif dan tepat sasaran, dibutuhkan pelaksanaan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan berorientasi pada hasil.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini akan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui dokumen perencanaan tahunan (Renja), laporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mekanisme pemantauan dan evaluasi ini menjadi instrumen utama dalam mengukur capaian sasaran, menganalisis kendala dan tantangan, serta melakukan penyesuaian kebijakan bila diperlukan.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan arah kebijakan yang terukur dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan tujuan besar pembangunan Kota Pontianak dalam mewujudkan keluarga berkualitas, masyarakat inklusif, dan pembangunan yang berkeadilan dapat tercapai secara berkelanjutan.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO